

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Konsultan Bedah Kampung Diupah Rp 556 Juta Per RW

○ Diusulkan dalam RAPBD DKI 2020
JAKARTA (Pos Kota) – Polemik anggaran janggal dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 terus disorot. Setelah pengadaan lem aibon, kini Dewan mempertanyakan anggaran konsultan penataan RW kumuh.

Pada APBD 2020, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran konsultan sebesar Rp556 juta per RW. "Anggaran dengan nama kegiatan Community Action Plan (CAP) itu terlalu besar. Masak setiap RW upah jasa konsultannya segede itu," kritik per RW," Yuke Yurike, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11).

Politisi PDI Perjuangan ini mencoba mengkalkulasikan kebutuhan anggaran konsultan bila setiap RW dibayar ratusan juta. "Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Kerja sama dengan kampung saja kan bisa lebih murah," ucapnya.

Yuke menjabarkan, anggaran sebesar itu terbagi dua, yaitu biaya langsung untuk personel Rp475,8 juta dan biaya langsung non personel Rp29,7 juta.

Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya. Sedangkan biaya langsung tidak personel yakni laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discussion (FGD).

Yuke mengaku terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta tersebut. Meski APBD itu masih bersifat rancangan, tetapi anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.

TENAGA AHLI

Sementara Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Barat, Suharyati menjelaskan, anggaran konsultan tersebut digunakan untuk lima tenaga ahli.

"Tenaga ahli yang kami gunakan ada lima, dari planologi, sipil, arsitek, sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat," papar Suharyati.

Peneliti tersebut bukan hanya sekali meneliti, tetapi hidup di RW tersebut dalam 24 jam selama empat bulan.

"Nah pekerjaannya mengkaji kehidupan masyarakat di sana selama 24 jam, memperhatikan, mengamati kebiasaan masyarakat, dan mencari aspirasi masyarakat seputar apa yang mereka inginkan terhadap lingkungannya," sambungnya. Suharyati menegaskan, anggaran Rp 500 juta, bukan satu konsultan, tetapi satu RW. Dana itu, sudah termasuk dengan surveyor dan lainnya.

20 LOKASI

Adapun sampai dengan 2022, Gubernur Anies Baswedan berencana menata 200 RW berpredikat kumuh. Keperluan itu, Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta nomor 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Juga, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta nomor 90 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu.

Pada 2018, Pemprov DKI Jakarta sudah menganggarkan dana sebesar Rp9,96 miliar untuk perencanaan konsep penataan 20 lokasi yakni Kota Bambu Utara, Kebon Jeruk, Kedaung Kali Angke, Pinangasia, Kapuk, Galur, Penjaringan, Kalibaru, Tugu Utara, Ancol, Pluit, Duri Pulo, Tegal Parang, Kramat Pela, Bukit Duri, Cakung, Kampung Melayu, Klender, Pisangan Timur, dan Cipinang Besar Utara.

Kemudian, pada 2019 juga dianggarkan Rp24 miliar untuk program perencanaan konsep penataan dan Rp320 miliar menata 60 RW yakni, tiga RW di Jakarta Pusat, 25 RW di Jakarta Utara, 14 RW di Jakarta Barat, enam RW di Jakarta Selatan dan 12 RW di Jakarta Timur. (john/ruh/st)